



Pemikiran Politik Amien Rais: Strategi Politik Adiluhung Bagi Negara Demokrasi

Arif Muammar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

Email: amar.langsa@yahoo.com

Alamat: Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

Abstract: *This article aims to analyze Amien Rais's political thinking. Using a qualitative approach with descriptive analysis, this study uses library data. The results of this study indicate that Amien Rais is a political figure who is strongly influenced by Islamic teachings in carrying out his political system. In his view, Islam cannot be used as the basis of a formal system in a country. But Islamic values must be carried out optimally in the system. This has led to a lack of appreciation of the values of other religions and values derived from the very rich local wisdom in Indonesia. In Amien Rais's thinking, a State must adhere to always putting Islam as a source of moral-ethics in setting its political foundation in the life of the nation and state. Amien Rais argues that tauhid is a moral-ethical foundation in developing a political system which is then formulated into the politik adiluhung.*

Keyword: *Amien Rais, Political, Indonesia, Reformation, Politik Adiluhung*

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisa pemikiran politik Amien Rais. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif, penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amien Rais adalah tokoh politik yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam menjalankan sistem politiknya. Dalam pandangannya, Islam tidak dapat dijadikan landasan sistem formal dalam sebuah Negara. Tetapi nilai-nilai Islam harus terlaksana secara optimal dalam sistem. Ini menyebabkan kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai dari identitas agama lain dan nilai-nilai yang berasal dari kearifan local yang sangat kaya di Indonesia. Dalam pemikiran Amien Rais, sebuah Negara harus menganut selalu menempatkan Islam sebagai sumber etika-moral dalam menetapkan landasan kepolitikannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Amien Rais berpendapat dengan tauhid sebagai landasan moral-etis dalam membangun sistem politik yang kemudian diformulasikan menjadi politik Adiluhung.

Kata Kunci: Amien Rais, Politik, Indonesia, Reformasi, Politik Adiluhung

1. PENDAHULUAN

Kajian terhadap politik telah banyak menghasilkan konsep, wacana bahkan paradigma yang beragam. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh para pemikir dan intelektual dari Timur Tengah, namun tuntutan disumbangkan oleh intelektual Indonesia sendiri, seperti Muhammad Natsir, Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais.

Amien Rais juga berpendapat bahwa politik yang Islami, tidak memberi tempat bagi sekularisasi. Sebab sekularisasi pada dasarnya adalah ideologi, yakni sekularisasionisme. Politik yang menganut paham keagamaan dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya sangat relative dan situasional. Politik yang dijalankan oleh seorang Muslim, sudah tentu bukan politik sekuler, melainkan politik yang penuh komitmen kepada Allah. Tujuan yang diletakkan oleh politik semacam ini bukanlah kekuasaan atau pencapaian suatu kepentingan demi kepentingan-kepentingan tertentu, posisi politik dan sebagainya bukanlah tujuan.

Semua itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yakni pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam bidang politik ini, Amien Rais juga memberi gagasannya yang dimuat dalam majalah *Panji Masyarakat* dengan tema “Tidak ada negara Islam”,. Menurut Amien Rais Negara Islam (Islamic State) tidak ada dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Menurut Amien Rais sekularisasi merupakan hal yang tidak mengenal istilah pemisahan antara urusan negara dan urusan akhirat. Di antara keduanya itu bersifat terpadu dan berkelanjutan, sekularisasi dalam bentuk apapun merupakan bagian dari sekularisme.

Amien Rais melihat ideologi sebagai sesuatu yang serba mencakup (integral) atas seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam bernegara politik. Sebagai sesuatu yang serba mencakup, ideologi dalam pandangan Amien Rais yang kemudian diidetikkan dengan Islam. Maka dalam konteks ini Islam kemudian diposisikan sebagai ideologi.

Maka dengan demikian Amin Rais sangat berbeda dengan intelektual yang lain, salah seorang politik Indonesia M. Amien Rais (selanjutnya disebut Amien Rais) sering membedakan antara *high politics* (politik kualitas tinggi) dan *low politics* (politik kualitas rendah). Dalam pandangan Amien Rais *high politics* adalah politik yang luhur, yang berdimensi moral etis atau dengan ungkapan lain politik yang dijalankan sesuai dengan semboyan *al-amr bi am-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*. Artinya, ia menekankan pada politik berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan yang dimaksud *low politics* adalah politik yang terlalu praktis dan sering kali cenderung nista.

Membicarakan pemikiran Amien Rais dalam bidang politik yang saat menarik ialah, sosok Amien Rais dikenal sebagai pemikir dan praktisi politik muslim yang pemikirannya berlandaskan kepada cita-cita membangun politik kualitas tinggi (*high politics*) yaitu politik dengan semangat *al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*. Kerangka *al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar*, sesuatu ajaran moral agama, yang menurut Amien Rais, harus dijabarkan oleh setiap pemeluknya dalam potret Indonesia, sehingga menemukan relevansinya sebagai sesuatu alat koreksi atau lebih tepatnya sebagai alat kritik efektif bagi pelurusan budaya dan sistem politik kekuasaan (*power politics*).

Biografi Amien Rais

Nama lengkapnya adalah Muhammad Amien bin Suhud bin Qomar Rais, lebih dikenal dengan M. Amien Rais. Ia dilahirkan di Solo, pada tanggal 26 April 1944, atau satu tahun sebelum Indonesia merdeka. Kedua orang tuanya adalah aktivis kelompok modernis Islam.

Amien Rais dilahirkan dalam keluarga dan kultur Muhammadiyah yang kental. Ayahnya bernama Suhud Rais, seorang guru agama dan sehari-hari bekerja sebagai Kepala kantor Departemen Agama Solo. Ia adalah pengurus Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah cabang Surakarta. Saat itu ayahnya juga aktif di Partai Masyumi. Ayahnya memiliki sifat yang saat lembut dalam memberikan pelajaran yang disampaikan dalam bentuk cerita atau dongeng dan sangat memberi kesan mendalam bagi murid-muridnya jika ia memberikan pelajaran di sekolah. Anak-anaknya dididik di sekolah Islam dan diarahkan kelak dapat membesarkan Muhammadiyah yang menjadi obsesi dan cita-citanya. Membesarkan, memajukan dan turut aktif dalam berbagai aktifitas di lingkungan Muhammadiyah merupakan bagian hidup dari keluarga Syuhud Rais. Karena itu, mereka sangat mencintai Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam modern, bahkan kecintaannya sudah sampai ketulang sumsumnya. Tahun 1985 ayah Amien Rais wafat dalam usia 71 tahun.

Sementara itu, ibunya Sudalmiyah, pernah cukup lama menjabat sebagai Ketua Aisyiah (selama 20 tahun), organisasi kewanitaan Muhammadiyah di Surakarta. Di samping aktivis, ibunya juga adalah seorang pendidik yaitu sebagai pengajar di SGKP (Sekolah Guru Kepandaian Putri) Negeri dan Sekolah Bidan Aisyiyah Surakarta. Bahkan ia pernah mendapat gelar Ibu Teladan II se-Jawa Barat tahun 1985.

Kakek dari ayahnya, Qomar Rais berasal dari Buka Teja, Purbalingga, Jawa Tengah. Sedangkan kakek dari ibunya, Abdul Rozaq dari Purworejo, ia juga bersal dari keluarga Muhammadiyah. Kemudian kakek yang satunya lagi dari pihak ibunya, Sukiman Wiryosudarmo. Sukiman pernah menjadi pegawai pemerintahan di jabatan Pos dan Pegadaian di kota Jakarta. Dia juga salah seorang pendiri Muhammadiyah di Gombong, Jawa Tengah.

Ibunya sangat menekan disiplin, baik dalam hal adat maupun agama. Sejak usia 9 tahun, pendidikan disiplin dari ibunya dimulai dengan rutinitas bangun subuh pukul 04.00 setiap pagi. Sebuah jam weker diletakkan di dekat tempat tidur anak-anaknya. Setiap yang bangun diharuskan mengucapkan *al-sal atu khayrun min al-nawn*, dengan suara keras agar dapat didengar ibunya, lalu mereka diberikan uang 50 sen. Hadiah itupun mereka tabung untuk dibelikan baju lebaran.

M. Amien Rais adalah anak kedua dari enam bersaudara, mereka adalah: Fatimah Rais, Amien Rais, Abdul Rozaq Rais, Siti Aisyah Rais, Achmad Dahlan Rais dan Siti Asiyah Rais. Mereka semua tinggal di rumah orang tuannya di Kampung Kepatihan Kulon, Kecamatan Banjar Sari, Solo Jawa Tengah. Sejak kecil Amien Rais terkenal cerdas, rajin

membaca, disiplin, pemberani sampai Taufik Abdullah pernah mengatakan bahwa Amien Rais lebih cocok menjadi orang Batak dari pada orang Solo.

Seluruh saudara Amien Rais, merupakan aktifis Muhammadiyah yang berpengaruh sebagaimana ayah dan kakek mereka. Fatimah Rais sebagai anak pertama pegawai Pendidikan Nasional Palembang. Kini ia menjadi anggota DPRD di Sumatra Selatan dari PAN. Ia adalah alumni pendidikan Bangsa Indonesia Akademi Saraswati Solo. Razaq Rais anak ketiga, guru sekaligus pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah Solo, alumni IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah. Siti Aisyah Rais, anak keempat Guru Taman Kanak-kanak Muhammadiyah dan Ketua Wilayah Solo. Akmad Dahlan Rais, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, salah satu Ketua MUI Jawa Tengah dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Ia adalah alumni Magister Humaniora dari Universitas di Australia. Siti Asyiah, bekerja dalam usaha restoran Chinese Food Muslim di Yogyakarta. Ia alumni *Mu'allimin* Muhammadiyah atau setingkat Aliyah.

Amien Rais menempuh pendidikan formalnya di sekolah Muhammadiyah Solo, dari TK hingga SMA. Masa sekolah di tingkat SMP ia aktif di kepanduan organisasi Muhammadiyah yang dikenal dengan Hizbul Wathan di Kota Solo. Ketika di SMP kelas dua ia memperdalam agama kepada Kiai Anwar Shidiq di Kampung Kauman, Solo. Ilmu agama juga diperolehnya dari Sekolah Agama Islam *Manba' al-'Ulum* di dekat Mesjid Agung Surakarta setiap petang hari, lalu pindah ke *Madrasah al-Islam*.

Melalui aktifitas ini ia mulai menemukan semangat kolektivitas ketika harus berhadapan dengan gencarnya modernisasi, sementara akar-akar kultur masih sangat kuat dengan struktur pedesaan, walau secara fisik dilahirkan di wilayah urban. Latar sosial kultural yang membuat komitmen perjuangan Amien Rais bersifat keumatan. Kemudian ia memasuki sekolah SMA Muhammadiyah tahun 1959 di kota Solo. Masa itu sistem pengajaran sekolah swasta belajarnya siang hari, jumlah murid di kelas ada 43 orang pelajar, ia berada di sekolah SMA bagian C (bagian ilmu bahasa).

Amien Rais dapat dibanggakan dalam dunia pendidikan, nilainya sangat memuaskan bahkan bahasa Inggris mendapat nilai 9, untuk pelajaran lain cukup baik. Setelah tamat SMA ia diterima di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan tanpa melalui seleksi. Saat itu merupakan prestasi yang luar biasa. Jarak dari kampungnya Solo sekitar satu jam perjalanan dengan kerta Api. Selain itu, ia juga diterima di fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini berubah menjadi Universitas Islam Sunan Kalijaga). Meskipun ia hanya memperoleh gelar Sarjana Muda, namun lembaga IAIN paling tidak mempengaruhinya.

Amien Rais tidak hanya dibesarkan dilingkungan, tradisi dan kultur Muhammadiyah yang kuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dalam lingkungan sosiologis dan antropologis yang menjadi tempat munculnya organisasi tersebut. Jadi dapat dikatakan ia mewarisi darah Muhammadiyah dari kedua orang tuannya, pendidikan dan lingkungan Muhammadiyah kota Solo, Surakarta dan Yogyakarta, merupakan daerah yang mempunyai basis massa Muhammadiyah yang panatik.

Meski ia dilahirkan dalam budaya Jawa namun kedua orang tuanya lebih memilih Islam sebagai cahaya sejak dini pada diri Amien Rais. Budaya santri untuk membedakan abangan dan priyayi, dari ayah dan ibunya mengalir secara praktis dan simultan pada Amien Rais bersaudara. Tak mengherankan sejak beliau ia telah terbiasa bangun pagi jam 04.00, puasa senin-kamis dan *I'tikaf* di Masjid. Hal ini sangat membekas dan membentuk karakter pribadi Amien ketika beranjak menjadi dewasa.

Pada tahun 1969, Amien Rais menikah dengan Kurnariyatri Sri Rahayu. Ia adalah anak dari Abdul Madjid yang juga aktivis Muhammadiyah sahabat ayah Amien Rais di Solo. Mereka bertetangga dan berdekatan rumah. Saat menikah Amien Rais berusia 25 tahun sedangkan Kusnariyanti berusia 19 tahun. Wanita ini juga aktif mengasuh bidang pendidikan bersama para pengurus Aisyiyah, di samping rumahnya di Condong Catur, Yogyakarta. Setelah menunggu sampai paling kurang 14 tahun, Amien Rais dengan Kurnariyanti Sri Rahayu telah dikarunia anak yaitu; Ahmad Hanafi, Hanum Salsabilah, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fausia dan Baihaqi.

Posisi Amien Rais di Muhammadiyah pada banyak sisi bagaikan Abdurrahman Wahid di Nahdatul Ulama. Jika Abdurrahman Wahid dikenal sebagai keturunan darah biru (sebab ia cucu KH. Hasyim Asy'ari) di NU. Maka Amien Rais juga dapat dikatakan demikian. Jika Abdurrahman Wahid Masyur sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran dikalangan NU, maka Amien Rais pun seperti itu. Abdurrahman Wahid mulai dari ayahnya sampai kakeknya, baik dari ayah maupun ibunya merupakan pendiri langsung organisasi NU. Amien Rais juga demikian mulai dari ayah, kakek dari pihak ayah dan ibunya merupakan aktivis tulen Muhammadiyah. Keduanya pun dikenal akrab dengan wacana-wacana Islam kontemporer baik nasional maupun internasional.

Sejak di SMP Amien Rais telah aktif di organisasi kepemudaan Muhammadiyah. Meski orang tuanya mengharapkan ia untuk menjadi kiyai. Namun, Amien Rais mengaku ketika ia bercita-cita untuk menjadi Walikota. Setamat SMA ia terdaftar di dua Universitas sekaligus. Yaitu fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu politik UGM, namun belakangan ada peraturan yang melarang kuliah di dua Universitas, maka ia lebih memilih di UGM.

Ia terkenal mahasiswa yang cerdas, rajin menulis artikel di Surat Kabar serta suka bersenandung sambil bermain gitar. Tahun 1967, ia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk menulis dikalangan mahasiswa dengan mendapatkan Zainal Zakse Award. Zainal Zakse adalah wartawan Koran harian KAMI, ia wafat dalam sebuah demonstrasi pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) tahun 1965.

Semasa menjadi mahasiswa Amien Rais aktif di organisasi, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi organisasi tempat beliau berkiprah. Ia sempat memegang jabatan sekretariat Lembaga dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) Yogyakarta (1963-1965). Selain itu, ia juga aktif di IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) sebagai organisasi yang secara ideology berasal dari Muhammadiyah. Di sini ia menjabat ketua III di DPP IMM.

Tahun 1969, Amien Rais berhasil meraih gelar sarjana Muda Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sedangkan gelar sarjana ia raih dari UGM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 1968 dengan judul skripsi; *Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientasi Pro-Barat?* Usai menamatkan studi, Amien Rais kemudian mendaftarkan diri sebagai tenaga edukatif di UGM. Kemudian tahun 1972, Amien dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti program Master di University Of Notre Dame di Indiana, selesai tahun 1974. Dari Universitas ini ia memperoleh sertifikat studi tentang Uni Sovyet dan Eropa Timur. Di penghujung tahun 1975, Amien Rais mengambil program doctor di Universty Of Chicago dan selesai 1981. Setelah ia melanjutkan *post doctoral* di George Washington Universty dan UCLA Amerika Serikat (1988-1989). Di Universty of Chicago ia diajar langsung Fazlur Rahman, pemikir Islam dari Pakistan yang sangat berpengaruh saat itu bahkan sampai sekarang. Rahman juga merupakan guru dari Nurcholis Madjid dan M. Syafii Ma'rif. Amien Rais, Nurcholis dan Syafii digelar “Tiga Pendekar Dari Chicago” oleh Abdurrahman Wahid yang menampilkan jurus-jurus yang berada meski satu guru.

Pemikiran Politik Amien Rais

Amien Rais dalam memandang Politik sebagai salah satu sarana untuk menciptakan kehidupan yang Islami dan masyarakat yang madani. Namun, dalam pemahamannya tentang Negara menurut Amien Rais tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan Negara Islam, yang lebih penting adalah selama suatu Negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial, dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian yang jauh dari pada eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi golongan atau golongan, berarti

menurut Islam sudah dipandang segera yang baik. Menurut Amien ada beberapa barometer dalam menegakkan suatu Negara, yang pertama adalah Negara dan masyarakat harus dibangun berdasarkan keadilan, kedua harus ditegakkan prinsip syuro atau musyawarah serta demokrasi dan ukhuwah, dan ketiga ada beberapa macam kebebasan yang dilindungi, kebebasan berfikir dan beragam, kebebasan memperoleh pendidikan dan pekerjaan secara bebas, hak untuk hidup, merdeka, aman, hak untuk berpindah tempat, hak memilih, dan lain sebagainya. Berikut ini akan dijelaskan konsep-konsep yang perlu ditegakkan untuk mewujudkan Negara yang berkeadilan.

Konsep Keadilan

Dalam Islam, Negara dan masyarakat harus ditegakkan atas dasar keadilan karena berdirinya suatu negara bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya tidak saja keadilan hukum melalui *The Rule of Law* dan penerapan persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*) yang harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang apapun. Di samping itu ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketimpangan-ketimpangan yang tajam di antara kelompok masyarakat. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah masyarakat.

Amien tidak menyetujui konsep persamaan kesempatan (*Equality of Opportunity*) yang menjadi semboyan kebanggaan liberalism, kapitalisme, karena persamaan kesempatan secara selaras nampak bagus tetapi justru akan melahirkan ketidaksetaraan dan ketimpangan di antara kelas-kelas di tengah-tengah masyarakat, karena titik berangkat masing-masing kelas sudah tidak sama. Di kaya akan terus memanfaatkan dan mendorong kesempatan ini sedang semakin akan mengalami kebangkrutan dan tidak mungkin mampu menggunakan kesempatan yang diberikan karena tidak memiliki apa-apa, kecuali badan dan tenaga, maka berdasarkan kesempatan ini yang kaya akan terus bertambah kaya sedang yang miskin akan tetap miskin.

Demikian juga Amien menolak prinsip persamaan hasil akhir (*Equality of result*) bagi setiap orang dalam suatu Negara, persamaan hasil akhir komunis dan ini melahirkan ketidakadilan karena menurut prinsip ini mereka yang cerdas dan bebal, yang rajin dan malas, yang dinamis dan statis, harus menikmati hasil yang sama, sehingga prinsip ini mengendurkan bahkan membunuh kreatifitas manusia. Ajaran Islam memang mentolerir perbedaan-perbedaan tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat, tetapi perbedaan itu tak boleh mencolok sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam serta

kebencian antar kelas (*Social Hotred*). Islam menentukan institusi-institusi pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antara golongan kaya dan si miskin misalnya dengan zakat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, jika zakat belum cukup untuk melakukan proses pemerataan kearah keadilan sosial ekonomi, maka pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengambil secara paksa sebagaimana harta dari kelompok kaya untuk diberikan kepada orang lain yang memerlukannya sampai benar-benar terselenggaranya keadilan ekonomi dan ini merupakan implementasi dari persamaan kesempatan.

Amien sebagai mana di kutip oleh Umaruddin Masdar, menempatkan keadilan sebagai dasar pertama bagi bangunan suatu masyarakat atau Negara, karena menurutnya hal pertama yang diperintahkan Allah adalah keadilan, baru kemudian berbuat kebajikan (ihsan) dan menyusul menghindari kedhaliman. Namun dalam konteks ini politik praktis yang perlu ditegaskan adalah keadilan distributive dan keadilan referesentatif yaitu kelompok yang mempunyai anggota lebih besar harus memiliki banyak wakil dan sebaliknya.

Berdasarkan pengamatan Amien di atas ada dua dimensi keadilan, keadilan hukum dan keadilan sosial. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila, menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (An-Nisa:58)

Demokrasi dan Masyarakat

Sejak tahun 1990-an demokrasi muncul sebagai isu baru seakan-akan menggantikan masalah integral ke Islam dan ke Indonesia. Dalam konteks terminologi Indonesia demokrasi sesungguhnya bukan suatu yang baru, karena dalam masa pergerakan nasional, konsep ini didengungkan dengan baik berbagai landasan perjuangan maupun sekedar *life service*, selanjutnya istilah demokrasi tidak pernah absent dalam panggung sejarah politik Indonesia, namun dalam prakteknya sering diberi embel-embel sehingga menjadi “Demokrasi Terpimpin” atau Demokrasi Pancasila. Pasca perang dunia ketiga, demokrasi telah berkembang menjadi suatu yang universal dan diperlukan sebagai simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia. Dengan mendunianya demokrasi ini jadi semacam kemajuan tak tertulis bagi Negara di seluruh dunia, untuk mencantumkan label demokrasi di dalam forum politik yang dimiliki. Demokrasi bukan hanya sistem kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetensi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal,

khususnya nilai persamaan, kebebasan, pluralism, serta eksistensi demokrasi juga berkaitan dengan eksistensi asasi manusia.

Persinggungan Islam dan demokrasi sosial baru muncul sejak umat Islam bersinggungan dengan Barat, yang identik dengan demokrasi karena telah lama memperjuangkan dan mempraktekkan demokrasi serta didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil, membuat mereka berupaya keras untuk membuat masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu mereka berupaya menguasai dan menduduki daerah lain terutama demokrasi kawasan Asia Timur dan Tengah untuk mendapatkan sumber kekuasaan dan strategis.

Demokrasi sebagai suatu wacana yang hadir dalam konteks modern telah menjadi sesuatu yang lebih dari jati dirinya yang asli. Seolah-olah demokrasi telah menjadi sesuatu yang universal, ia lahir tidak kedad dari nuasa sosial-historis. Namun keberadaan sering diimpor dan dipaksakan untuk diaktualisasikan dan diterapkan diberbagai Negara yang memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dengan dimana tempat lahirnya demokrasi, dengan demikian habibat yang berbeda memunculkan keragaman yang merespon isu-isu demokrasi. Dalam pandangan Amien, perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat yang didalamnya intisari *amar ma'ruf nahi munkar* berfungsi efektif, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi, menurutnya esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Salah satu kelebihan demokrasi dibandingkan dengan sistem politik lainnya adalah bahwa dalam demokrasi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih, bukan saja memilih pekerjaan dan tempat tinggal yang disukainya, tetapi juga memilih pemimpin yang paling dipercaya. Lebih lanjut Amien mengungkapkan bahwa Islam memiliki prinsip yang berwatak demokrasi di dalamnya ia, menceritakan lima prinsip demokrasi yang terdapat dalam Islam.

Lima prinsip demokrasi itu adalah pertama, sistem politik harus didasarkan pada prinsip musyawarah, artinya pemimpin politik hanyalah abdi rakyat harus dipilih dalam suatu pemerintahan yang bebas dan terbuka. Kedua, didalam Islam emerintahan harus didasarkan atas dasar keadilan dan kesetaraan, tidak hanya keadilan dan kesamaan dalam hukum, namun lebih dari itu juga pada dataran wilayah sosial dan ekonomi. Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam Islam. Ketiga, Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, Islam tidak membedakan orang atas gen, etnis, warna kulit, dan latar belakang sejarah, sosial dan ekonomi. Keempat, kebebasan dalam Islam di definisikan sebagai kebebasan berfikir, beragam, berbicara, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kelima, pertanggungjawaban

merupakan prinsip yang fundamental dalam Islam. Para pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyat atas kebijakan-kebijakannya.

Menurut Amien ada Sembilan kriteria demokrasi, pertama, partisipasi rakyat dalam membuat keputusan, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Menurutnya yang perlu ditekankan di semua pemilihan wakil rakyat itu harus dilakukan secara langsung, bebas, adil, rahasia, dan jujur. Kedua, persamaan didepan hukum, setiap warga negara sama didepan hukum serta sama dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaan produk-produk hukum atau aturan perundang-undangan dilapangan, kedua, aspek ini harus adil dan konsisten dengan didukung institusi control yang independen. Ketiga, distribusi pendapatan yang adil, persamaan untuk sektor ini tidak cukup sebatas *de jure*, tapi *de facto*, agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Keempat, kebebasan dijamin Undang-undang baik itu hak memperoleh pekerjaan, hak tempat tinggal, hak pendidikan, kebebasan pers, bergaul, berorganisasi, agama, hak untuk mengajukan petisi, dan untuk protes atau oposisi. Hal itu dilakukan untuk mencegah bentuk korup dan dispotik, karena pada umumnya kekuasaan cenderung demikian. Pemberian kebebasan Pers dan berbicara harus berlandaskan nilai-nilai agama.

Kelima, pendidikan yang sama, tingkat pendidikan ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan, keenam, tersedianya dan keterbukaan informasi, rakyat harus *well informed* mengenai politik pemerintah sehingga tidak ada sikap *a priori* menerima atau menolak kebijakan, apalagi kejadian itu menyangkut masalah yang prinsipal dan fundamental. Ketujuh, mengindahkan etika politik, tanpa etika politik maka kekuasaan yang ada akan cenderung menghalalkan segala cara, dalam bahasa agama Islam, etika politik yang dibutuhkan adalah al-Akhlak Al-Karimah. Kekuasaan sebagai amanat ialah, ada empat macam element kepemimpinan yaitu shidiq, amanah, tablik, dan fathonah, yang terbukti tetap tahan banting dan masih sangat relevan disepanjang zaman. Kedelapan, semangat kerjasama, demokrasi disatu sisi menghargai sikap individualistic sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun sisi lain, demokrasi juga mewajibkan sistem kolektivitas, kerjasama, misalnya dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Kesembilan, demokrasi menegakkan keadilan sosial, untuk itu Amien mengharapkan agar tidak hanya mengupas keadilan hukum, tapi keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Menurutnya untuk mengubah kesenjangan sosial kita perlu mengubah cara pengelolaan dan sistem ekonomi kita dimasa mendatang. Usaha serius dan menyeluruh itu dengan melenyapkan praktek monopoli dan keluarganisme dalam perekonomian Indonesia. Tanpa hal itu kesenjangan sosial akan meluas dan keadilan sosial akan terlantar sehingga demokrasi belum berjalan baik di Indonesia. Demokrasi yang telah kita terima selama ini masa Orde Lama dan Orde baru, merupakan bentuk yang paling dekat dengan ajaran wahyu ilahi, sehingga tidak salah jalan. Pada dasarnya menurut Amien sebagian konsep demokrasi bisa diserap oleh agama Islam, asal tidak bertentangan dengan akhlak keagamaan. Misalnya konsep keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, toleren, keterbukaan dan kebebasan.

Konsep Ukhuwah

Ukhuwah dalam konsep pandangan Amien adalah persaudaraan yang tidak membedakan umat manusia baik di tingkat bangsa maupun masyarakat dunia atas dasar jenis kelamin, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, ekonomi, dan sebagainya yang harus dibangun berdasarkan cinta, bahkan dalam konteks keIslaman persaudaraan juga harus ditumbuhkan terhadap keluarga atheis selama mereka tidak mengganggu masyarakat berTuhan menjalankan perintah agamanya.

Mereka juga tidak boleh mengganggu orde-orde Islam yang ingin menegakkan perintah-perintah wahyu demi semua umat manusia, sesuai dengan fungsi Islam rahmat alam semesta, tanpa diskriminasi apapun. Islam menganggap negara sebagai satu keluarga besar bahkan masyarakat internasional sebagai satu keluarga yang sangat besar, yang tiap anggota keluarganya harus menghormati. Kendati demikian, ia tidak menapik kenyataan historis bahwa sistem dunia sekarang terdiri dari unit Negara bangsa dan umat Islam dalam posisi mayoritas maupun minoritas dibawah yuridikasi nation state. Oleh karena itu kita tidak boleh menolak konsep Negara bangsa, karena kalau demikian kita masih berfikir picik dan utopis. Dalam konteks keIslaman ada perbedaan yang diperbolehkan yaitu perbedaan mazhab, perbedaan dalam strategi perjuangan umat dan tidak dibenarkan dalam kemurnian keyakinan tauhid. Perbedaan yang bisa ditolerir dalam batas tertentu bisa menimbulkan rahmat tidak hanya bagi Muslim tapi juga bagi masyarakat lain yang pada gilirannya mendorong kreativitas dan inovatif. Sebagai tokoh yang ahli dalam masalah Timur Tengah, Amien tidak bisa mentolerir tokoh-tokoh dunia seperti Reza Pahlevi atau terkenal dengan nama Syah Iran,

Syadam Husain yang menurutnya mengabdikan kepada kekuasaan atheis dan serta merta perbuatannya menentang kebenaran umat Islam.

Amien menganggap agar konsep tersebut (konsep kenegaraan) ditafsirkan secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Dalam hal ini perlu berbicara tentang kontekstualisasi dalam arti operasionalisasi penerapan ajaran dalam realitas kehidupan modern tanpa mengubah ajaran Islam agar cocok dengan kecenderungan perubahan zaman. Hal ini perlu dilakukan di tengah dominasi barat dengan segala macam teorinya yang laku di dunia ke tiga. Ukuwah dalam Islam mencakup tiga tingkatan, pertama ukuwah Insaniah, yakni persaudaraan diantara sesama manusia secara menyeluruh. Kedua, ukuwah Rabbaniyah yaitu ikatan di antara mereka yang percaya pada Tuhan, Ketiga ukuwah Islamiyah berarti ikatan persaudaraan sesama Umat Islam.

Ukuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang bersifat universal dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang”. 9 Al-Hujarat (49):13)

Strategi Politik Adi Luhung

Amien menegaskan bahwa partisipasi politik haruslah terbuka bagi siapa pun. Lebih dari itu, dalam pandangannya, masyarakat Muslim pun sejatinya harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan itu. Hal tersebut karena Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif, menyentuh segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya menganjurkan umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan politik. Akan tetapi politik yang dikehendaki oleh Islam, menurut Amien, politik yang wajar, konstitusional, legal, terbuka, demokratis dengan mengindahkan akhlak dan moral agama itu sendiri. Kegiatan politik menurut Amien harus menjadi bagian integral bagi kehidupan seorang Muslim. Mengherankan jika seorang Muslim menjauhi, apalagi membenci politik, padahal politik sangat menentukan arah dan nasibnya sendiri.

Kajian pemikiran politik dalam khasanah ilmu politik, bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Ini biasa diruntut dari sejarah pemikiran politik yang ada, baik klasik, pertengahan maupun modern. Sejarah pemikiran politik di Indonesia diawali dengan munculnya rasa nasionalisme modern. Masalah moral tampaknya menjadi suatu pokok persoalan yang melanda umat manusia dalam berbagai sisi kehidupannya. Dalam bidang

ekonomi sudah mulai dipertanyakan apakah ekonomi yang mendominasi dunia sekarang ini adalah suatu ekonomi yang telah dilucuti dari konteks moral dan budaya. Apabila tadinya ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan manusia yang berinteraksi dan terikat dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, disinyalir bahwa disamping telah melepaskan diri dari aspek-aspek yang lain, terutama aspek moral dan budaya, sekarang ini ekonomi juga telah mendominasi aspek-aspek yang lain, terutama aspek moral dan budaya.

Dalam bidang politik dapat disaksikan bahwa belakangan ini tampaknya telah menjadi semacam pendapat yang diterima masyarakat bahwa kata-kata politik sering kali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Karena itu, politik merupakan sebuah dunia dimana orang memberikan janji-janji yang tidak akan dipenuhi, serta obral kata-kata yang memang dari semula telah direncanakan untuk memberikan kesan yang tidak benar bagi para pendengar. Dalam politik seperti itu, orang mengadakan perjanjian-perjanjian rahasia yang sama sekali tidak akan dapat diterima masyarakat, apabila mereka mengetahuinya. Dalam politik, orang melakukan segala macam tindakan yang tidak sesuai dengan budi pekerti, moral dan akhlak yang mulia. Kenyataan seperti ini telah menjadikan kata-kata politik memiliki konotasi yang tidak terhormat.

Pemikiran Amien Rais tentang politik banyak dipengaruhi oleh pemahamannya mengenai Tauhid. Ajaran tauhid mengajarkan mengenai keesaan Allah dan sebuah dasar dari seluruh sistem ajaran Islam. Ajaran Tauhid dipandang oleh Amien Rais tidak sebatas mengesakan Allah tetapi dia meyakini adanya hal yang lebih dari ajaran tersebut yaitu Kesatuan Penciptaan (*Unity of Creation*), Kesatuan Kemanusiaan (*Unity of Mankind*), Kesatuan tuntutan hidup (*Unity of Purpose of Life*) sebagai derivasi dari Kesatuan Ketuhanan (*Unity of Godhead*). Selain itu pemikiran seorang Amien Rais juga dipengaruhi oleh Pemikiran seorang tokoh *Syiah* bernama Ali Syari'ati, dalam pemikiran Ali ada hal yang merasuki pemikiran seorang Amien Rais yang oleh dijadikan sebuah pedoman. Ali berpandangan bahwa sistem sosio-ekonomi Islam adalah sistem sosialisme ilmiah yang didasarkan pada *Monoteisme (Tauhid)*.

Titik berat pemikiran politik Amien Rais lebih mengarahkan pada visi keislaman yang serba Tauhid, Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam juga tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, termasuk pemerintahan. Nilai-nilai Islam dianggap harus mewarnai wujud pelaksanaan pemerintahan. Ini tentu saja tidak. Kehadiran Amien Rais dalam pentas sosial politik di Indonesia berada pada situasi sosial politik yang relatif stabil bahkan dapat dilihat sebagai puncak dari suatu pemerintahan, contohnya pada zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, bapak Pembangunan yang telah meletakkan dasar-dasar sosial

politik yang cukup mapan bahkan kekuatan Orde Baru ini telah mengakar selama 25 tahun pemerintahan Soeharto dan menunjukkan pownya dalam kehidupan sosial politik. Secara mendasar pemikiran politik jebolan Chicago University ini juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap syariah. Hakikat syariah menurut Amien Rais bertujuan untuk membangun kehidupan manusia yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan (ma'rufat) dan membersihkan dari berbagai kejahatan (munkarat). Ideologi politik Amien didasarkan kepada visi pemikiran Islam puritan dari tokoh-tokoh Ikhwan Al-Muslimun dan Jema'at Al-Islami, dan pemikiran kaum modernis awal yang secara teologis dan ritual mempengaruhi. Diantaranya pemikiran Natsir yang diidolakannya dan Muhammadiyah yang pernah dipimpinnya memiliki hubungan histories dengan Masyumi yang dipimpin M. Natsir.

Bagi Amien Rais, syariat Islam merupakan sesuatu yang universal yang didalamnya menyatu semua persoalan dimana aspek-aspeknya saling bertaut membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara ideologi dengan amal ibadah dan amal social Karena itu syariat Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan dunia atau antara Islam dengan sekuler.

Bagi Amien Rais sekuler dan sekulerisasi sama saja, yakni sekularisasio-nalisme (secularizationisme), Amien Rais menjelaskan: "Sekalipun sekularisasi dicoba dibedakan dari sekularisme, berhubung yang terakhir ini adalah ideologi sedangkan yang kedua menunjuk pada proses sosial yang bersifat open-ended, pada dasarnya ia juga sebuah ideologi yakni ideologi sekularisasi (secularizationism). Politik yang menganut paham sekularisasione sudah tentu menjadi politik tanpa dasar-dasar moral keagamaan dan nilai-nilai yang berlaku di dalamnya bersifat sangat relatif dan situasional". Amien Rais yang telah masuk dalam barisan elit intelektual Indonesia yang diperhitungkan dan didengar pemikirannya, tidak pernah bosan-bosan mengungkapkan berbagai bentuk anomali sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesenjangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi, manipulasi dan praktek-praktek ekonomi-politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral-etik dikritiknya secara berani.

Oleh karena itu berangkat dari dasar pemikirannya tentang tauhid, Amien Rais merumuskan garis perjuangannya dengan sebutan Politik Adiluhung yang kemudian diistilahkan menjadi *high politics*. Nama adi luhung itu sendiri dikonsepsikan Amien dari sejarah kebudayaan Jawa sebagaimana dirinya berasal (asli Solo).

Terminologi adiluhung berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua suku kata, adi dan luhung; adi yaitu suatu bentuk terikat yang unggul, besar, yang utama terbaik. Sedangkan luhung bermakna sebagai Jawa luhur, mulia. Mangku negara IV menulis Serat Wedatama dengan maksud agar orang dapat menghayati ilmu, budinya membuat setiap orang

menghormatinya. Jadi, adiluhung dapat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai mutu yang tinggi, seni budaya yang bernilai dan wajib dipelihara. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Maka konsep adiluhung berusaha menggambarkan dunia dan kehidupan manusia melalui kriteria utama yaitu “kebenaran”. Makna adiluhung adalah dunia yang bersifat dinamis, relatif, dan bukan eksklusif. Nilai estetikanya pasti terkait dengan kepribadian manusia. Karena ketinggian tingkat apresiasinya, bahasa symbol adiluhung sangat bermutu lantaran mampu menghaluskan rohaniah; mempertajam dalam konteks ini yaitu ide maupun pemikiran yang dikemas dalam bingkai kesadaran yang tinggi (moral). Bahasa adiluhung itu merupakan bagian dari kesusastraan Jawa, bagi masyarakat Jawa, sastra merupakan karya yang tertata apik dalam bahasa yang indah (basa rinengga).

Karya sastra Jawa yang terlahir melalui pengolahan rasa dan laku tanpa, disebut sebagai sastra adiluhung atau sastra yang memiliki tingkat apresiasi tinggi. Alam sadar manusia yang selalu haus siraman iman, menjadi ruang ideal muara adiluhung yang merupakan penetrasi budaya yang berujud akulturasi Islam dan Jawa. Selain itu, adiluhung menyajikan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan social.

Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang-orang, antar manusia, antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Maka konsep adiluhung berusaha menggambarkan dunia dan kehidupan manusia melalui kriteria utama yaitu “kebenaran”. Makna adiluhung adalah dunia yang bersifat dinamis, relatif, dan bukan eksklusif. Nilai estetikanya pasti terkait dengan kepribadian manusia. Karena ketinggian tingkat apresiasinya, bahasa symbol adiluhung sangat bermutu lantaran mampu menghaluskan rohaniah; mempertajam visi, misi dan ruang imajinasi, membuat manusia santun jiwanya, bertambah pengetahuannya, berkepribadian mulia, dan luas jiwanya.

Apresiasi pada adiluhung, memang meniscayakan wawasan yang luas, ketajaman pikiran dan kehalusan perasaan. Karena ia dikemas dalam bentuk-bentuk simbol yang multi tafsir. Wacana adiluhung (Jawa klasik) hadir melampaui sejarah (trans-historis), ruang dan waktu. Demikian pula obyeknya adalah realitas kehidupan, meskipun dalam menangkap realitas tersebut sang actor tidak mengambilnya secara acak. Ia memilih dan menyusun bahan-bahan itu dengan berpedoman pada asas dan tujuan tertentu. Serat Wedhatama karya Mangkunegoro IV misalnya, bertujuan mengajak umat manusia pada kemuliaan budi, dan larangan memperturukkan budi jahat. Mangku negara menangkap realitas sosial dan pandangan Jawa bahwa gejala-gejala lahiriyah, memiliki kekuatan kosmis nominus yang

merupakan realitas sebenarnya. Dan realitas itu adalah batin manusia yang berakar dalam dunia *nominus* tersebut.

Wedhatama juga mengajarkan laku spiritual khususnya terkait proses kebaktian kepada sang pencipta, atau dikenal dengan sembah raga, cipta, rasa dan karsa. Lain lagi jika realitas adiluhung itu sebuah peristiwa sosial atau sejarah, maka sang actor mencoba menerjemahkan peristiwa itu dalam bahasa imajiner dengan maksud untuk memahami peristiwa tersebut menurut kadar kemampuan pemikirannya. Makna adiluhung dapat menjadi sarana bagi penggunaannya untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan tanggapannya mengenai berbagai peristiwa dalam realitas kehidupan.

Politik adiluhung yang sedang diperankan oleh Amien dimaksudkan sebagai gerakan politik yang dipayungi dalam gerakan amal saleh (*moral*). Dalam nada yang hampir tidak jauh berbeda M. Natsir juga pernah menegaskan keharusan desakralisasi terhadap dewa-dewa (*politik*) yang diangkat. Inilah manifestasi dari tauhid. Artinya, tauhid sebenarnya adalah pembebasan dari belenggu rasa takut yang semu (dan bahkan pemujaan) terhadap pribadi-pribadi yang selama ini dianggap besar dan tak tertandingi., dalam artian bahwa nilai-nilai keagamaannya (*Islami*) yang berkaitan dengan ide-ide pemikiran politiknya, telah terkandung di dalam politik adiluhung itu. Bagi Amien Rais, objek atau target gerakan moralnya ialah meruntuhkan kebatilan/ kemungkaran (*dakwah nahi munkar*) dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi yang ditegakkan dalam suatu sistem pemerintahan. Contohnya pada sistem Orde Baru. Ada semacam upaya sistematis rezim untuk mensakralkan lembaga kepresidenan dan Amien Rais tahu persis bahwa resiko teologis dan politik dari sikap mensakralkan lembaga kepresidenan ini terlampau besar. Sikap tersebut jelas syirik, sebuah dosa yang takkan terampuni oleh Tuhan dan akan memorak-porandakan seluruh tatanan kehidupan.

KESIMPULAN

Amien Rais sebagai salah satu intelektual Muslim kontemporer Indonesia dan tokoh politik yang cukup diperhitungkan, lewat pemikiran ide/gagasan-gagasan segarnya, bahkan aksi atau kiprah politiknya, selalu menempatkan Islam sebagai sumber etika-moral dalam menetapkan landasan kepolitikannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Amien Rais berpendapat dengan tauhid sebagai landasan moral-etis dalam membangun sistem politik yang kemudian diformulasikan menjadi politik Adiluhung (*high politics* yang bernafaskan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan garis perjuangannya).

Pemikiran politik Amien adalah pemikiran politik yang memperjuangkan demokrasi, hal tersebut terlihat jelas ketika dia secara tegas menolak formalisasi Negara Islam dan

memilih demokrasi sebagai jalan atau sistem pemerintahan. Meskipun menerima demokrasi Amien mengajukan atau memberikan tiga syarat, yaitu negara harus dibangun atas dasar keadilan, menegakkan prinsip musyawarah dan adanya persamaan serta persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Amien ada beberapa kriteria demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam membuat keputusan, persamaan di depan hukum, serta sama dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaan produk hukum, distribusi pendapatan yang adil, kebebasan dijamin undang-undang, pendidikan yang sama, tersedia dan terbukanya informasi, mengindahkan etika politik, adanya semangat kerjasama, menegakkan keadilan sosial, menegakkan HAM dan dapat mewujudkan masyarakat madani. Tauhid sebagai pondasi dan dasar kuat dalam melaksanakan atau menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Tanpa pegangan tauhid masyarakat Indonesia khususnya Islam akan mengalami kegagalan dalam berdemokrasi. Demokrasi tanpa tauhid tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat, inilah yang kita maksud dengan “demokrasi religius” (demokrasi ketuhanan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohim, G. (1998). PAN dan high politik. Dalam G. Abd. Rohim (Ed.), M. Amien Rais dalam sorotan generasi muda Muhammadiyah. Bandung: Mizan.
- Abd. Rohim, G. (Ed.). (1998). M. Amien Rais dalam sorotan generasi muda Muhammadiyah. Bandung: Mizan.
- Abu, R. (2001). Saat da'wah memasuki wilayah politik (Cet. I). Bandung: Syaamil.
- Ahmad, A. Z. (2001). Membangun negara Islam (Cet. I). Jakarta: Pustaka Iqra.
- Ahmad, B. (1998). Amien Rais berjuang menuntut perubahan. Yogyakarta: Pena Cendikia.
- Ahmad, M. (2004). Mengapa pemikiran agama dan politik sang pahlawan reformasi. Jakarta: Lentera.
- Airlangga, P., & Yudhie, R. H. M. (2002). Post Islam liberal: Membangun dentuman, mentradisikan eksperimen (Cet. I). Jakarta: Pasar Muda Bangsa Mas.
- Al-Bahnasawi, A. S. (1996). Wawasan sistem politik Islam (M. Maufur, Trans.). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Ghazali Abdurrahman. (1998). Amien Rais dalam sorotan generasi muda Muhammadiyah (Cet. I). Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, A. A. (1998). Hukum dan konstitusi sistem politik Islam (A. Hikmah, Trans.). Bandung: Mizan.

- Anshari, E. S. (1997). Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1949). Jakarta: Gema Insani Press.
- Anshari, E. S. (1997). Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1949). Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan aksi Islam di Indonesia: Sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru. Bandung: Mizan.
- Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan aksi Islam di Indonesia: Sebuah kajian politik tentang cendekiawan Muslim Orde Baru (Cet. I). Jakarta: Paramadina.
- Azhar, B. A. (1993). Refleksi atas persoalan Keislaman seputar filsafat, hukum, politik, dan ekonomi (Cet. I). Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2001). Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2004). Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Akar pembaharuan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Barbanas, S. (2002). Pemilu yang demokratis. Pontianak: Yayasan Sejahtera Indonesia.
- Benda, J. (1980). Bulan sabit dan matahari terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bondan, B. J. (1985). Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- Budi, H. (2013). Sistem politik Indonesia. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Dawan, R. (1993). Mengembangkan sistem kerjasama umat Islam. Dalam H. Bagir (Ed.), Satu Islam sebuah dilema. Bandung: Mizan.
- Dawan, R. (1996). Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep dan kunci (Cet. I). Jakarta: Paramadina.
- Dawan, R. (1996). Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep dan kunci (Cet. I). Jakarta: Paramadina.
- Djalaluddin, M. D., & Subandy, I. I. (1998). Zaman baru Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rakhmat. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Djamaluddin, D., & Idi Subandi, I. (1998). Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid dan Jalaludin Rakhmat. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Effendi, B., & Fachry, A. (1996). Merambah jalan baru dunia Islam. Bandung: Mizan.
- End. (1988). Van Den Harta dalam bejana: Sejarah gereja ringkas. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fachry, A. (1997). High politics dan demokrasi. Dalam A. Afandi (Ed.), Islam demokrasi atas bawah: Strategi perjuangan umat model Gusdur dan Amien Rais (Cet. II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fachry, A. (1997). High politics dan demokratisasi. Dalam A. Afandi (Ed.), *Islam dan negara: Demokrasi atas bawah dalam Arief Afandi* (Penyunting). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fananie, Z., Atiqa, S., & Dwi, P. (2002). *Radikalisme keagamaan & perubahan sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Graaf, H. J. (2003). De & Th. Pigeaud: *Kerajaan Islam pertama di Jawa: Tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI*. Jakarta: Grafiti dan KITLV.
- Gunawan, H. (2000). *M. Natsir dan Darul Islam (Studi kasus Aceh dan Sulawesi tahun 1953-1958)* (Cet. I). Jakarta: Media Da'wah.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi pendidikan, kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hefner, W. R. (2001). *Civil Islam: Islam dan demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Idris, T. (2005). *Demokrasi religius: Pemikiran politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais* (Cet. I). Bandung: Teraju.
- Imran, N. (n.d.). *Amien Rais menjawab isu-isu politik seputar kiprah kontroversialnya*. Bandung: Mizan.
- Istiyono. (2004). *Teologi politik Gus Dur*. Yogyakarta: AR-Ruzz.
- Kencana, S. (2010). *Azhari: Sistem politik di Indonesia*. Bandung: Insani Press.
- Kholid, N., & al-Caidar. (1999). *Era baru Indonesia: Sosialisasi pemikiran Amien Rais, Hamza Haz, Matori Abdul Djali, Nur Mahmudi, Yusril Izra Mahendra*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas politik umat Islam* (Cet. II). Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. (1997). *Menjadi dua strategi saling komplementer*. Dalam A. Afandi (Penyunting), *Islam demokrasi atas bawah: Polemik strategi perjuangan umat model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. I. (1999). *Amien Rais legenda reformasi* (Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfud, M. (1999). *Pergaulan politik dan hukum di Indonesia* (Cet. I). Yogyakarta: Gama Media.
- Najib, M. (1998). *Membunuh Amien Rais* (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.
- Najib, M., & Dkk. (1999). *Amien dari Yogya ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Najib, M., & Sukardiyono, K. (1998). *Amien Rais sang demokrat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ni'matul, H. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Noeng, M. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Reke Sarasin.
- Noer, D. (1996). *Gerakan modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet. VIII). Jakarta: LP3S.

- Nurcholis, M. (1999). Cita-cita politik Islam era reformasi. Jakarta: Pardikma.
- Oliver, R. (2005). Genealogi Islam radikal. Yogyakarta: Genta Press.
- Pranowo, B. M. (1993). Partai politik dan Islamisasi di pedesaan Jawa. Dalam S. Muzani (Ed.), Pembangunan dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Pulungan, J. S. (1995). Fiqhi siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran (Ed. I, Cet. I). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rais, A. (1983). Indonesia dan demokrasi. Dalam B. Carvallo & D. Dasrizal (Eds.), Aspirasi umat Islam Indonesia. Jakarta: Leppenas.
- Rais, A. (1986). Pengantar dalam Demokrasi dan proses politik. Jakarta: LP3S.
- Rais, A. (1993). Cakrawala Islam: Antara citra dan fakta (Cet. IV). Bandung: Mizan.
- Rais, A. (1993). Semangat berkorban sendi persaudaraan. Dalam H. Bagir (Ed.), Satu Islam sebuah dilema (Cet. VII). Bandung: Mizan.
- Rais, A. (1995). Moralitas politik Muhammadiyah (Cet. I). Yogyakarta: Dinamika.
- Rais, A. (1996). Cakrawala Islam: Antara fakta dan cita (Cet. VII). Bandung: Mizan.
- Rais, A. (1996). Dalam dinamika pemikiran Islam dan Muhammadiyah (Cet. I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, A. (1997). Demi kepentingan bangsa (Cet. I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, A. (1998). Membangun politik adiluhung: Membumikan tauhid sosial menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (Cet. I). Bandung: Zaman.
- Rais, A. (1998). Refleksi Amien Rais dari persoalan semut sampai gajah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rais, A. (1999). Tauhid sosial: Formula menggempur kesenjangan. Bandung: Mizan.
- Rais, A. (2003). 17 langkah Amien Rais membangun Indonesia. Jakarta: The Arc.
- Ramage, E. D. (2002). Percaturan politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan ideologi toleransi (H. Hadikusumo, Trans.). Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Ricklefs, M. C. (1994). Sejarah Indonesia modern (D. H. Hardjowidjono, Trans.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salim, A. M. (2002). Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an (Cet. III). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, F. B. (2009). Demokrasi Pancasila dalam nilai-nilai politik. Jakarta: Erlangga.
- Sobrani, M. (1998). Kata pengantar. Dalam D. Djamaluddin & I. I. Subandi (Eds.), Zaman baru Islam Indonesia: Pemikiran dan aksi politik (Cet. I). Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Soeprapto, S., dkk. (2008). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik. Jakarta: Grasindo.
- Syafi'i, M. A. (1985). Studi tentang percaturan dalam konstituante: Islam dan masalah kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
- Syafi'i, M. A. (1986). Islam dan masalah kenegaraan (Cet. II). Jakarta: LP3ES.
- Syalabi, A. (1983). Prinsip-prinsip pemerintahan Islam (S. Nabhan, Trans.). Surabaya: Mizan.
- Syam, F. S. (2003). Amien Rais: Politisi yang merakyat & intelektual yang shaleh (Cet. I). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Syam, F. S. (2003). Politisi yang merakyat dan intelektual yang shaleh (Cet. I). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Syariati, A. (1995). Ummah dan imamah (A. Muhammad, Trans.). Bandung: Pustaka Hidayah.
- Taimiyah, I. (1995). Siyasa syariah: Etika politik Islam (A. Munawar, Trans.). Surabaya: Risalah Gusti.
- Thahir, L. (2005). Natsir, M: Dakwah dan pemikirannya (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.
- Tholhah, H. (2005). Prepektif Islam dalam menghadapi tantangan zaman (Cet. I). Jakarta: Lontabaro Press.
- Trimansyah, B. (1998). Para tokoh di balik reformasi: Episode sang oposan: Lokomotif itu bernama Amien Rais. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Turmudi, E., & Sihbudi, R. (Eds.). (2005). Islam dan radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Umaruddin, M. (1999). Membaca pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang demokrasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.
- Umaruddin, M. (2005). Membaca pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang demokrasi. Demokrasi religius: Pemikiran politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais (Cet. I). Bandung: Teraju.
- Wertheim, W. F. (1974). Islam before and after the elections. Dalam O. H. Lee (Ed.), Indonesia after the 971 elections (hlm. 88-96). Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Zada, K. (2002). Wacana syariat Islam: Menangkap potret gerakan Islam di Indonesia. Tashwirul Afkar.
- Zainiddin, M. Z. (1997). Dakwah dan politik: Da'i berjuta umat (Cet. I). Bandung: Mizan.